

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Faried, 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Refika Aditama, Bandung.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung
- Arif, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Friedman, Lawrence M, 1994, *Total Justice*, Sage Foundation, Russel.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Guwandi, 2008, *Hukum Dan Dokter*, Sagung Seto, Jakarta,
- Hadjon, Philipus M, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O. S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Kusnardi, Moh. Ibrahim dan Harmail, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Paulo, Rodrigo dan Sean Stacy, 2024, *Process Failure: What Does the Lack of Appellate Review Mean for Due Process of Law in WTO Disputes?*, World Trade Institute, Bern.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemardjono, Maria. S.W., 2021, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sudrajat, Tedi, dan Sri Hartini, 2018, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wade, Sir William dan Christopher Forsyth, , 2000, *Administrative Law*, Eighth Edition, Oxford University Press, New York.

Karya Ilmiah

Aceh, Hainum Mawaddah, 2015, “Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Afifah Nabila, Mutiara Deja Saputri, Nabila Zahra Okta Dwiwani, Iskandar, Sonia Ivana Barus, “Perbandingan Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Sanksi Disiplin ASN Dalam Sistem Kepegawaian Nasional Pasca UU No.20 Tahun 2023” *Causa, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 13, No 1, 2025.

Ardyati Rizda, 2020, “Eksistensi Badan Pertimbangan Kepegawaian Sebagai Banding Administratif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil” *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Charter, Lief H. dan Mashawc J. L. “On Due Process in the Administrative State”, *American Bar Foundation Research Journal*, Vol. 11, No. 1, Winter 1986.

Gede I Komang Oka Wijaya, “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 32 No. 1, Januari 2017.

Latifa, Asma, “Penerpan Hukum Administrasi Negara Dalam Membangaun Pemerintah Yang Baik”, *Jurnal Polycsopia*, Vol. 1, No. 3, 2024.

Riana Okma, 2018, “Tinjauan Yuridis Penerapan Due Process of Law pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Ridwan, “Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 28, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 545)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Internet:

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Diakses melalui laman https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 12 Maret 2025

BKN. "Delapan Pegawai ASN Diberhentikan, Kepala BKN: Penanganan Kasus Disiplin ASN Harus Tegas.", <https://www.bkn.go.id/delapan-pegawai-asn-diberhentikan-kepala-bkn-penanganan-kasus-disiplin-asn-harus-tegas/>, diakses pada 22 Februari 2025.

Bimasakti Muhammad Adiguna, S.H. (Hakim pada PTUN Mataram), "Catatan Evaluasi Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/551-catatan-evaluasi-undang-undang-no-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-uu-ap-2.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.

Henry Black, 1979, *Black Law Dictionary Black*, 6th Edition USA : West Group, USA,